



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Lansia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa dengan terus bertambahnya jumlah Lansia dari tahun ke tahun yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban Pemerintah Daerah, untuk itu diperlukan bantuan guna peningkatan kesejahteraannya;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lansia, Pemerintah Daerah perlu memberikan arahan, bimbingan dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan Lansia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
 - 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 49670);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 882);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

Dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
7. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
8. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa.
10. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah dan Lansia rentan sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
11. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
14. Keluarga Lansia adalah keluarga yang memiliki salah satu atau lebih anggota keluarganya Lansia.
15. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
16. Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
17. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat dengan Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kepada Lanjut Usia di masyarakat yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor, pemerintah dan non pemerintah, swasta dan organisasi sosial dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif.
18. Puskesmas Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Puskesmas Santun Lansia yang mengutamakan aspek promotif dan preventif disamping aspek kuratif dan rehabilitatif secara pro aktif, baik dan santun, memberikan kemudahan dan dukungan bagi lanjut usia, melakukan pelayanan oleh tenaga profesional, serta melaksanakan pelayanan dengan standar teknis pelayanan yang berlaku.

19. Pelayanan Harian Lanjut Usia (*Day Care Services*) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat secara profesional.
20. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (*Home Care Service*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau didalam keluarga sendiri.
21. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (*Foster Care Service*) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain /pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau Lansia dalam kondisi terlantar.
22. Pembinaan Lansia adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus para Lansia.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
24. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
25. Asistensi Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memberikan bantuan sosial agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
26. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
27. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
28. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
29. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual sosial, pengetahuan, dan ketrampilan agar para lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
30. Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia atau lansia itu sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidup Lansia dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian dan kesejahteraan lansia.
31. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
32. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya.

Pasal 2

Kesejahteraan Lansia diselenggarakan berasaskan:

- a. keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kekeluargaan;
- c. keseimbangan;
- d. keadilan; dan
- e. keserasian dalam perikehidupan.

Pasal 3

Kesejahteraan Lansia diselenggarakan agar Lansia tetap dapat berdaya, mandiri, sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Lansia.

Pasal 4

Kesejahteraan Lansia diselenggarakan bertujuan untuk:

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif Lansia;
- b. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lansia sehingga Lansia memiliki kehidupan yang berguna dan berkualitas;
- c. memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat di Daerah serta untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. meningkatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan Lansia;
- e. meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga Lansia dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

BAB II KEWAJIBAN DAN HAK LANSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Lansia mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lansia potensial dan Lansia Tidak Potensial.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sesuai dengan peran dan fungsinya, Lansia berkewajiban untuk:

- a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;

- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; dan
- c. memberikan keteladanan dan mewariskan nilai-nilai luhur dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 7

Setiap Lansia mempunyai hak yang sama dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 8

- (1) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia ditujukan pada Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial.
- (2) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan secara terkoordinasi antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

Upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia Potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan Lansia;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. bantuan sosial.

Pasal 10

Upaya peningkatan kesejahteraan bagi Lansia Tidak Potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan Lansia;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- e. Perlindungan dan bantuan sosial; serta
- f. bantuan informasi dan pendidikan bagi keluarga yang menanggung Lansia.

BAB IV
PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 11

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing; dan
 - b. penumbuhan rasa percaya diri, penghargaan dan perhatian/kepedulian dari keluarga dan masyarakat sekitar, dan/atau penyediaan aksesibilitas, sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh SKPD, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama SKPD lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Lansia

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan Lansia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dengan berperilaku hidup yang sehat dan pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan, agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia (promosi kesehatan) Lansia yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lainnya;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology di tingkat Puskesmas sampai ke Rumah Sakit;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, pelayanan medis maupun pelayanan jaminan kesehatan bagi Lansia;

- d. upaya pelayanan rehabilitatif yaitu pelayanan kesehatan lanjutan pasca penyembuhan; dan
 - e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia serta Poli dan Rawat Inap Lansia di Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pelayanan kesehatan Lansia, dilaksanakan oleh SKPD, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama SKPD lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh SKPD, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama SKPD lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1 Sektor Formal

Pasal 15

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 16

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. faktor lain.

Paragraf 2
Sektor Non Formal

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi dan pemasaran;
 - b. pemberian kemudahan dalam perizinan usaha; dan
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses modal pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 18

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial melalui kemitraan di bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi Lansia Potensial baik yang mampu atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh SKPD terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama SKPD lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan
Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Pasal 20

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia.

- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:
- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus; dan
 - e. pusat belanja ramah Lansia.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 1
Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lansia untuk:
- a. memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan pernikahan; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum lainnya.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak; dan
 - d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama SKPD lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama SKPD lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lansia dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
 - d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan
 - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama SKPD lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pusat perbelanjaan dan/atau pasar, baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat untuk ramah kepada Lansia dalam bentuk pemberian sosialisasi dan penyediaan alat bantu Lansia.

Paragraf 2 Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 26

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia.

Pasal 27

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 28

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 29

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi; dan
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 30

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dapat berupa:

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
- f. tempat minum; dan
- g. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 31

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- d. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- e. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- f. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- g. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 32

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;

- d. tempat minum;
- e. toilet; dan
- f. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 33

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 34

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebaran informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 35

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana pembangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 36

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 37

Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam **Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum**

Pasal 38

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemberian Perlindungan Sosial

Pasal 39

- (1) Pemberian perlindungan sosial bagi Lansia dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial yang tidak mampu atau Lansia Terlantar agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat hidup dengan wajar.
- (2) Perlindungan sosial bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti dalam bentuk:
 - a. pendampingan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat kegiatan kesejahteraan bagi Lansia, baik yang dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - c. pelayanan sosial bagi Lansia Terlantar dan/atau miskin dalam panti baik milik Pemerintah Daerah maupun milik masyarakat;
 - d. pemberian asistensi sosial bagi Lansia Terlantar; dan
 - e. pemberian alat bantu kedisabilitas.
- (3) Lansia Tidak Potensial yang terlantar yang meninggal dunia, dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pemberian perlindungan sosial bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Bantuan Sosial

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu, agar dapat memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap dan dapat berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Lansia Potensial yang tidak mampu;

- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (5) Pemberian bantuan sosial di luar panti dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pelayanan Harian Lansia (*Day Care Services*);
 - b. pelayanan melalui Keluarga Sendiri (*Home Care Services*);
 - c. pelayanan melalui Keluarga pengganti (*Foster Care Services*);
 - d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- (6) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi Lansia Potensial tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

Penghargaan terhadap upaya mensejahterakan Lansia dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berperan penting dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia di Daerah dan memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua Jenis dan Bentuk

Pasal 42

Penghargaan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan dalam bentuk medali.

Pasal 43

- (1) Medali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berbentuk bulat dengan bentuk gambar dan tulisan tertentu di dalamnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, bahan, warna, bentuk gambar dan tulisan dalam medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Setiap pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, disertai dengan pemberian piagam penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, bahan, warna dan tulisan dalam piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 45

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:
 - a. perorangan:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. dewasa; dan
 3. mampu untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. keluarga:
 1. salah seorang anggota keluarga bertindak mewakili keluarga yang bersangkutan; dan
 2. anggota keluarga yang bertindak mewakili keluarga memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. kelompok:
 1. mempunyai pengurus kelompok; dan
 2. setiap anggota pengurus kelompok memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - d. organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan paling kurang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan waktu dan penilaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 46

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penghargaan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upacara resmi pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang telah ditetapkan.
- (4) Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara anumerta.
- (5) Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lansia dapat disertai dengan penyerahan hadiah kepada penerima penghargaan.

Bagian Kelima
Pemberian Penghargaan Secara Berulang

Pasal 47

Perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang telah memperoleh Penghargaan Kesejahteraan Lansia dapat diberikan Penghargaan Kesejahteraan Lansia secara berulang apabila perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan memenuhi persyaratan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 48

Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Lansia secara berulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 49

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (2) Peran serta masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 50

Lansia potensial dapat membentuk organisasi lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 51

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lansia yang ditetapkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (3) Pembiayaan komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan Lansia melalui paguyuban/kelompok kegiatan.
- (5) Pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

- (6) Menyediakan Panti Werdha baik yang dikelola Pemerintah Daerah maupun Masyarakat untuk melakukan pembinaan bagi Lansia Terlantar.
- (7) Di Kampung/Kelurahan dibentuk Lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (8) Karang Werdha yang dimaksud pada ayat (7) merupakan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang beranggotakan Posyandu Lansia sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan Lansia.
- (9) Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh forum kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha pada lingkup Kecamatan.
- (10) Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 September 2016**

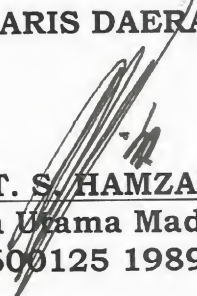
BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 September 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK:7.29.C/2016

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk memberikan kejelasan dan menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lansia, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik bagi Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Salah satu pembangunan sumber daya manusia Indonesia adalah melalui pengendalian jumlah penduduk. Penduduk terdiri dari lapisan penduduk yaitu balita, anak, dewasa dan lansia. Jumlah penduduk semakin hari semakin besar. Jumlah penduduk lansia yang besar ini membutuhkan penangannan yang serius, sebab mau tidak mau penduduk lansia akan menjadi salah satu lapisan penduduk yang jika tidak diberdayakan dengan maksimal akan menjadi lapisan penduduk yang dianggap beban pembangunan.

Di Kabupaten Siak sesuai dengan amanat tersebut dapat dibentuk kelompok atau wadah kegiatan bagi keluarga lansia dan keluarga yang memiliki lansia yang berusaha meningkatkan kegiatan dan ketrampilan keluarga dalam memberikan pelayanan, perawatan, pengakuan yang layak sebagai orang tua bagi lansia tidak potensial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga lansia melalui kegiatan pemberdayaan, pembinaan, serta pengembangan potensi bagi lansia. Sesuai dengan kriteria lansia adalah:

- a. Lansia Potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
- b. Lansia potensial tidak mampu: adalah lansia potensial yang tidak/belum dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.
- c. Lansia tidak potensial: adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah dan lansia rentan sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan *geriatrik* adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada Lansia (*degeneratif*), sedangkan gerontologi adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada Lansia (fisik, mental, dan psikososial).
Yang dimaksud dengan Kuratif: adalah pengobatan penyakit seperti pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap.

Huruf c
Penyakit terminal adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker stadium akhir.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Ketentuan ini di samping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sektor formal dalam ayat ini adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif. Sektor nonformal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan – aturan normatif.
Contoh : usaha kaki lima, kios, dan asongan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Usaha Kecil.

Ayat (2)
Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan social, serta lingkungan Lansia.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum seperti pembayaran listrik, telepon, air minum, dan sebagainya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lanjut usia di tempat-tempat umum, dapat berupa : jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2